

## KAJIAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Muhammad Hanri, Ph.D.

muhammad.hanri06@ui.ac.id

Nia Kurnia Sholihah, M.E.

nia.kurnia91@ui.ac.id

### DAFTAR ISI

Pengangguran dalam Angka  
- 1

Status Pekerjaan - 2

Distribusi dan Perubahan  
Berdasarkan Lapangan  
Usaha - 2

Tingkat Pendidikan - 3

Pendapatan dan Upah - 3

Pekerjaan Rumah untuk  
Pemerintahan Baru - 4



*Labor Market Brief* dapat diakses setiap bulan secara gratis dengan memindai kode QR di atas atau melalui tautan: <https://bit.ly/labormarketbrief>

## Menekan Pengangguran, Mendorong Transformasi Pasar Kerja Indonesia

### Ringkasan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Agustus 2024 menurun menjadi 4,91 persen, mencerminkan perbaikan ekonomi pascapandemi yang didukung kebijakan penciptaan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan. Meski partisipasi angkatan kerja meningkat, mayoritas pekerja masih terjebak di sektor informal dengan upah rendah dan perlindungan sosial minim. Distribusi pekerja di sektor formal bertambah menjadi 42,05 persen, sedangkan sektor-sektor utama seperti pertanian, perdagangan, dan industri menunjukkan tren positif dalam menyerap tenaga kerja. Namun, tantangan seperti ketidaksesuaian keterampilan (*skill mismatch*), kesenjangan upah gender, serta disparitas regional tetap memerlukan solusi strategis untuk memastikan transformasi pasar kerja yang inklusif dan berkelanjutan.

### Pengangguran dalam Angka

Pengangguran adalah salah satu indikator utama yang mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara, dan dalam konteks Indonesia, data terbaru menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,91 persen, turun 0,41 persen poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan langkah-langkah pemulihan ekonomi yang berhasil diterapkan pascapandemi COVID-19, termasuk upaya menciptakan lapangan kerja dan mendukung aktivitas ekonomi yang lebih inklusif.

Selain itu, jumlah angkatan kerja meningkat menjadi 152,11 juta orang, atau bertambah sekitar 4,40 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2023. Peningkatan ini mencerminkan dinamika demografis Indonesia, dengan jumlah penduduk usia produktif yang terus bertambah, serta dorongan dari kebijakan yang meningkatkan partisipasi ekonomi, seperti penguatan sektor formal dan pelatihan keterampilan melalui program pemerintah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik menjadi 70,63 persen,

mencerminkan keterlibatan ekonomi yang lebih luas, termasuk peningkatan kontribusi perempuan dalam angkatan kerja.

Namun, angka-angka ini tidak dapat dilepaskan dari tantangan. Meski terjadi peningkatan partisipasi, banyak pekerja masih terjebak di sektor informal dengan upah rendah dan perlindungan sosial yang minim. Oleh karena itu, meskipun angka TPT menunjukkan tren positif, perbaikan kualitas lapangan kerja menjadi agenda penting.

### **Status Pekerjaan**

Salah satu perkembangan positif dalam pasar tenaga kerja Indonesia adalah peningkatan jumlah pekerja formal. Pada Agustus 2024, sebanyak 60,81 juta orang, atau 42,05 persen dari total pekerja, berada di sektor formal. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,16 persen poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pekerjaan formal sering kali dikaitkan dengan stabilitas pendapatan yang lebih baik, perlindungan sosial, dan akses terhadap manfaat seperti asuransi tenaga kerja. Namun, mayoritas tenaga kerja (57,95 persen) masih bekerja di sektor informal, yang rentan terhadap risiko ketidakpastian pendapatan dan perlindungan hukum yang minim.

Dinamika lain yang perlu dicermati adalah peningkatan pekerja setengah pengangguran menjadi 8,00 persen, naik sebesar 1,32 persen poin dari tahun lalu. Sementara itu, pekerja paruh waktu menunjukkan sedikit penurunan menjadi 23,94 persen dari total penduduk bekerja. Kenaikan pekerja setengah pengangguran dapat mengindikasikan adanya kesenjangan antara ekspektasi pekerja terhadap kualitas pekerjaan dan kondisi pasar kerja saat ini. Hal ini memperlihatkan perlunya kebijakan yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memastikan bahwa pekerjaan yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan pekerja.

### **Distribusi dan Perubahan Berdasarkan Lapangan Usaha**

Distribusi tenaga kerja menurut lapangan usaha memberikan gambaran tentang dinamika sektor-sektor penyerap tenaga kerja di Indonesia. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi sektor utama dengan kontribusi sebesar 28,18 persen dari total penduduk bekerja. Peningkatan tenaga kerja di sektor ini sebanyak 1,31 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya mencerminkan peran penting sektor primer dalam menyerap tenaga kerja, terutama di daerah pedesaan. Namun, sektor ini sering kali

dikaitkan dengan produktivitas rendah dan pekerjaan dengan upah minimum.

Sektor perdagangan juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, menyerap sekitar 18,89 persen tenaga kerja, bertambah 0,78 juta orang. Ini menyoroti peran perdagangan, baik formal maupun informal, sebagai pilar utama ekonomi rakyat. Sementara itu, sektor industri pengolahan, yang menyumbang 13,83 persen tenaga kerja, bertambah sebanyak 0,66 juta orang. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur mulai bangkit setelah mengalami tekanan akibat pandemi, didukung oleh kebijakan insentif fiskal dan investasi baru.

### **Tingkat Pendidikan**

---

Ketimpangan dalam kualitas tenaga kerja Indonesia juga terlihat dari distribusi berdasarkan tingkat pendidikan. Sebagian besar tenaga kerja (35,80 persen) hanya memiliki pendidikan SD ke bawah, yang menunjukkan bahwa pendidikan dasar masih menjadi batas tertinggi bagi banyak pekerja. Hal ini berdampak pada keterbatasan keterampilan dan produktivitas mereka, serta mempersempit peluang untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal dengan upah tinggi.

Sebaliknya, tenaga kerja dengan pendidikan tinggi (diploma hingga S3) hanya mencapai 12,82 persen dari total penduduk bekerja. Meskipun angka ini menunjukkan tren peningkatan, kontribusi lulusan perguruan tinggi dalam pasar kerja masih terbatas. Tantangan lainnya adalah TPT tertinggi tercatat pada lulusan SMK, yaitu 9,01 persen, meskipun telah menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian keterampilan yang diajarkan di institusi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

### **Pendapatan dan Upah**

---

Dalam aspek pendapatan, rata-rata upah buruh nasional mencapai Rp3,27 juta per bulan, meningkat 2,81 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, masih terdapat kesenjangan gender yang signifikan. Rata-rata upah buruh laki-laki tercatat sebesar Rp3,54 juta, sementara perempuan hanya memperoleh Rp2,77 juta. Perbedaan ini mencerminkan tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender di tempat kerja,

meskipun pemerintah telah mendorong berbagai inisiatif untuk memberdayakan perempuan.

Dari segi sektor, lapangan usaha dengan rata-rata upah tertinggi adalah pertambangan dan penggalian (Rp5,23 juta) serta aktivitas keuangan dan asuransi (Rp5,08 juta). Sebaliknya, aktivitas jasa lainnya memiliki rata-rata upah terendah sebesar Rp1,99 juta, mencerminkan dominasi pekerjaan informal dengan produktivitas rendah.

### **Pekerjaan Rumah untuk Pemerintahan Baru**

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam menciptakan pasar tenaga kerja yang inklusif dan berkualitas. Meskipun tren penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan kemajuan, disparitas regional, ketidaksesuaian keterampilan (*skill mismatch*), dan dominasi sektor informal tetap menjadi hambatan signifikan bagi transformasi ekonomi. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah memerlukan strategi yang terukur dan berorientasi jangka panjang.

Disparitas Regional menjadi salah satu tantangan utama. Wilayah maju seperti Banten (6,68%) dan DKI Jakarta (6,21%) mencatatkan TPT yang jauh di atas rata-rata nasional, sedangkan daerah seperti Papua Pegunungan (1,32%) memiliki TPT terendah. Ketimpangan ini mencerminkan perbedaan dalam akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan lapangan kerja antara wilayah maju dan tertinggal. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, terutama di Indonesia bagian timur. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan 200 proyek infrastruktur baru yang mencakup transportasi, konektivitas digital, dan fasilitas pasar lokal. Langkah ini tidak hanya meningkatkan akses pasar bagi tenaga kerja di wilayah tersebut, tetapi juga diharapkan menciptakan 3 juta lapangan kerja baru.

Selain itu, pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) juga dapat menjadi prioritas di wilayah-wilayah dengan potensi ekonomi lokal. Sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata dapat menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja baru di daerah-daerah tertinggal. Kebijakan relokasi industri dari wilayah padat kerja seperti Jawa Barat dan Banten ke wilayah dengan tingkat pengangguran lebih rendah juga dapat mengurangi tekanan pada pasar tenaga kerja regional. Hingga saat ini, Indonesia memiliki 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang

berfokus pada sektor manufaktur, pariwisata, dan pertanian. Namun, sebagian besar KEK ini terletak di wilayah maju seperti Sumatera dan Jawa, sehingga kontribusinya terhadap pemerataan ekonomi masih terbatas. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah menetapkan pengembangan KEK di wilayah tertinggal sebagai prioritas. Wilayah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara memiliki potensi besar di sektor unggulan seperti perikanan, pariwisata, dan energi hijau.

Pemerintah menargetkan pembangunan lima KEK baru di wilayah timur Indonesia dalam lima tahun ke depan, dengan fokus pada sektor-sektor yang relevan dengan potensi lokal. Sebagai contoh, Papua dan Papua Barat dapat memanfaatkan kekayaan laut mereka untuk mengembangkan KEK berbasis perikanan terpadu, meliputi penangkapan, pengolahan, hingga ekspor hasil laut. Sementara itu, Nusa Tenggara Timur berpotensi mengembangkan KEK pariwisata berbasis alam dan budaya, seperti yang telah sukses dilakukan di KEK Mandalika di Lombok, yang menciptakan lebih dari 15.000 lapangan kerja langsung sejak dioperasikan.

Pembangunan KEK ini tidak hanya bertujuan meningkatkan investasi, tetapi juga menciptakan 500.000 lapangan kerja baru di setiap kawasan, dengan target total investasi mencapai Rp500 triliun. KEK juga dirancang untuk memanfaatkan teknologi modern dalam mendukung sektor pertanian dan perikanan. Sebagai contoh, pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah telah meningkatkan produktivitas beras hingga 3 ton per hektar, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 2,5 ton per hektar.

Ketidaksesuaian keterampilan (*skill mismatch*) menjadi salah satu tantangan utama dalam pasar tenaga kerja Indonesia. Masalah ini muncul ketika lulusan pendidikan formal tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, terutama di sektor teknologi dan manufaktur. Akibatnya, meskipun ada peluang kerja, banyak tenaga kerja tidak dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar. Kondisi ini semakin diperparah dengan percepatan transformasi digital dan industri 4.0, yang menuntut keterampilan teknis dan adaptasi yang lebih tinggi.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah berkomitmen untuk mereformasi sistem pendidikan vokasional. Salah satu langkah strategis adalah melibatkan sektor industri dalam penyusunan kurikulum pendidikan. Pendekatan ini memastikan bahwa materi pelatihan sesuai dengan permintaan pasar kerja, sehingga lulusan vokasi langsung siap kerja. Pemerintah juga merencanakan pembukaan 500 pusat pelatihan vokasional

baru yang berfokus pada teknologi digital, manufaktur, dan sektor jasa modern dalam lima tahun ke depan. Pelatihan ini akan difokuskan pada keterampilan praktis seperti pemrograman, pengelolaan data, operasional mesin manufaktur modern, serta layanan berbasis teknologi di sektor jasa.

Selain memperbaiki kurikulum, pemerintah juga menargetkan pelatihan berbasis industri untuk 5 juta tenaga kerja baru setiap tahunnya, dengan prioritas pada sektor-sektor strategis seperti teknologi hijau dan energi terbarukan. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis tetapi juga pengetahuan tentang keberlanjutan, sehingga tenaga kerja dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Sebagai contoh, pelatihan di sektor energi terbarukan mencakup instalasi panel surya, manajemen energi, dan operasi pembangkit listrik berbasis biomassa.

Untuk menjangkau lebih banyak tenaga kerja, terutama di daerah terpencil, digitalisasi pelatihan menjadi fokus utama. Pemerintah merencanakan pengembangan platform pelatihan daring yang memungkinkan akses ke kursus teknis tanpa harus hadir secara fisik. Platform ini dirancang untuk ramah pengguna dan mencakup modul pelatihan interaktif, sertifikasi digital, serta akses ke bimbingan dari profesional industri. Dengan pendekatan ini, tenaga kerja di wilayah tertinggal dapat mengembangkan keterampilan mereka tanpa hambatan geografis.

Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan pelatihan berbasis teknologi untuk 10 juta pekerja informal, sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilan dan masuk ke sektor formal yang lebih produktif. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan teknis tetapi juga menciptakan jembatan bagi tenaga kerja informal untuk mendapatkan akses pekerjaan yang lebih stabil, dengan perlindungan sosial yang lebih baik.

Dominasi sektor informal di Indonesia, yang mencakup sekitar 57,95% tenaga kerja, juga menimbulkan kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi global. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berkomitmen mempercepat transisi dari sektor informal ke formal melalui berbagai inisiatif strategis.

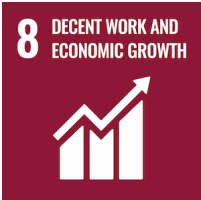
Pemerintah menargetkan penambahan 5 juta usaha baru ke sektor formal setiap tahunnya. Untuk mencapai target ini, proses registrasi usaha mikro akan dipercepat menjadi hanya 2 hari, dibandingkan rata-rata 14 hari sebelumnya. Selain itu, usaha mikro yang baru terdaftar akan mendapatkan insentif pajak, termasuk pembebasan pajak selama lima tahun pertama.

Langkah ini diharapkan mendorong lebih banyak pelaku usaha informal untuk beralih ke sektor formal, sehingga meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional.

Transisi ke sektor formal harus diiringi dengan perlindungan sosial yang memadai bagi pekerja informal. Pemerintah berencana memasukkan 15 juta pekerja informal ke dalam skema BPJS Ketenagakerjaan, yang memberikan manfaat perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Selain itu, pelaku usaha mikro dengan pendapatan di bawah Rp1 juta per bulan akan mendapatkan akses asuransi kesehatan gratis. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja informal dan memberikan rasa aman dalam bekerja, yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan produktivitas mereka.

Digitalisasi menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor informal. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan 50% UMKM informal mengadopsi teknologi digital, termasuk penggunaan platform *e-commerce* dan pengelolaan keuangan digital. Langkah ini diharapkan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha informal dan meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2023, sebanyak 22 juta UMKM telah bergabung dalam ekonomi digital, atau sekitar 33,6% dari total UMKM. Pemerintah terus mendorong peningkatan angka ini melalui berbagai program dan inisiatif.

Pemerintah juga mendorong kolaborasi antara sektor formal dan informal untuk memperkuat posisi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Langkah strategis ini memungkinkan UMKM masuk ke dalam rantai pasokan yang lebih besar, memaksimalkan potensi mereka dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional. Kolaborasi ini diharapkan meningkatkan daya saing UMKM Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.



## Referensi

Badan Pusat Statistik. (2024). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia, Agustus 2024* (No. 83/11/Th. XXVII). Jakarta: Badan Pusat Statistik. Retrieved from <https://bps.go.id>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210407/9/1377887/proyek-mandalika-bakal-cetak-total-90000-lapangan-pekerjaan>

<https://kemenperin.go.id/artikel/23534/Tingkatkan-Kualitas-SDM-Industri%2C-Kemenperin-Terapkan-TVET-4.0-dan-Pendidikan-Vokasi-Dual-System>

[https://umkm.kompas.com/read/2022/09/21/194130683/kemenkopukm-transformasi-usaha-informal-ke-formal-harus-dipercepat#google\\_vignette](https://umkm.kompas.com/read/2022/09/21/194130683/kemenkopukm-transformasi-usaha-informal-ke-formal-harus-dipercepat#google_vignette)

<https://vokasi.kemdikbud.go.id/read/b/tantangan-dunia-kerja-penyelarasan-pendidikan-vokasi-dengan-industri-menjadi-jawaban>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-samarinda/baca-artikel/16280/Studi-Kasus-Pengembangan-Kawasan-Ekonomi-Khusus-KEK-Mandalika.html>

<https://katadata.co.id/berita/industri/657ad3759b967/daftar-20-kawasan-ekonomi-khusus-ri-sukses-tarik-investasi-rp-167-t>

